



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

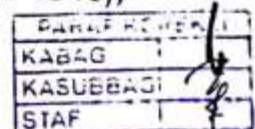
TENTANG

**PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

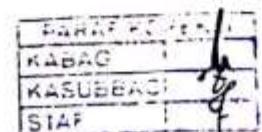
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa, pembuatan dan penerimaan arsip dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan untuk melindungi fisik informasi arsip dinamis dari kerusakan dan kehilangan perlu menyusun pedoman sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);





4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
  3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong;





4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

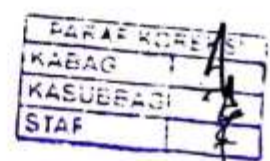
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
11. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi secara langsung atau tidak langsung oleh Badan Arsip.
12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Arsip Digital adalah arsip yang diciptakan dan digunakan dalam bentuk elektronik.
14. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	



17. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
18. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
19. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah pengkategorian/ penggolongan arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan perorangan.
20. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip.
21. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
22. Tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokkan arsip dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak berhak.
23. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
24. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
25. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yg tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
26. Sangat Rahasia, adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.
27. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
28. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
29. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Pemerintah Daerah.
31. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
32. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.
33. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.





## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengelola arsip dinamis serta memberikan layanan akses arsip kepada pengguna arsip yang berhak, tersedianya informasi arsip yang dikategorikan terbuka serta terjaminnya keamanan informasi dan fisik arsip.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi fisik dan informasi arsip, memberikan akses layanan arsip sesuai dengan kebutuhan pengguna arsip yang berhak.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

## BAB IV SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DAN AKSES ARSIP DINAMIS

### Pasal 5

- (1) Asas Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

### Pasal 6

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi :
    - 1) informasi biasa;
    - 2) informasi terbatas;
    - 3) informasi rahasia; dan
    - 4) informasi sangat rahasia;
  - b. keempat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
  - c. keempat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
  - d. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan
- (2) Sarana Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*)

KABAG	
KASUBAG	
STAF	



- (3) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa filing cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/ terbuka, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi;
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (4) Perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. daftar arsip aktif, in aktif, terjaga dan vital;
  - b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan in aktif.
- (5) Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka.
- (6) Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi bidang tugas sebagai berikut :
  - a. 000 Umum
  - b. 100 Pemerintahan
  - c. 200 Politik
  - d. 300 Keamanan dan Ketertiban
  - e. 400 Kesejahteraan
  - f. 500 Perekonomian
  - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan
  - h. 700 Pengawasan
  - i. 800 Kepegawaian
  - j. 900 Keuangan

#### Pasal 7

- (1) Kategori Arsip Dinamis, meliputi :
  - a. biasa/terbuka;
  - b. terbatas;
  - c. rahasia; dan
  - d. sangat rahasia.
- (2) Kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, yang tercipta dan dimiliki oleh semua Perangkat Daerah.
- (3) Kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja, yang meliputi :
  - a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti personal file, hasil pertimbangan Baperjakat dan rekam medis pegawai;
  - b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian perlengkapan seperti dokumen pengadaan barang;
  - c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
  - d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan bagian keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap Perangkat Daerah;
  - e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi bagian arsip, seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.
- (4) Kategori arsip rahasia dan sangat rahasia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mengandung dampak yang luas sehingga mengganggu kinerja, yang meliputi arsip dinamis yang tercipta dari Perangkat Daerah yang menangani urusan kasus/sengketa hukum, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), personal file, aset, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik dan daftar arsip vital.



BAB V  
PENGAMANAN ARSIP

Pasal 8

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
  - b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling kabinet;
  - c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
- (3) Pengamanan informasi arsip meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

Pasal 9

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KLASIFIKASI DAN PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 10

- (1) Sistem klasifikasi dan pengaturan akses arsip digunakan kepada pengguna arsip yang berhak.
- (2) Pengguna arsip yang berhak untuk mengakses arsip terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu pengguna internal yang ada di instansi dan pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 11

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari:
  - a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Pimpinan Tingkat Tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/instansi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;
    - 2) Pimpinan Tingkat Tinggi (satu tingkat dibawah pimpinan level tertinggi) yaitu Sekretaris dan Kepala Bidang yang mempunyai kewenangan untuk mengakses arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
    - 3) Pimpinan Tingkat Menengah (satu tingkat dibawah pimpinan level tertinggi), yaitu Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip dibawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, dan yang satu level diluar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	








- b. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level menengah, dan yang satu tingkat diatas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin;
  - c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri dari :
- a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka;
  - b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakkan hukum, seperti ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak pidana korupsi.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASURBAG	
DINAS PEMRAKARSA	


Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal September 2019


**BUPATI REJANG LEBONG,**

  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

  
**H. R. A. DENNI**

<b>N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM</b>	TCL :
	KABAG. ADM. HUKUM,  INSURAH HADJI WILJATA, S.H.M. P. 1979 10 23 2002 12 1000

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2019

**PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS**

I. TATA CARA PENYUSUNAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

Kegiatan Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di masing-masing SKPD disusun oleh pimpinan pencipta arsip. Prosedur penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis digambarkan dengan bagan alur sebagai berikut:



PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	



DAFTAR KLASIFIKASI DAN AKSES ARSIP DINAMIS

KEBUTUHAN PENGGUNA TERHADAP ARSIP DENGAN KATEGORI ARSIP

TERMASUK ARSIP KATEGORI KLASIFIKASI KEAMANAN  
A. SANGAT RAHASIA  
B. RAHASIA  
C. TERBATAS  
D. BIASA

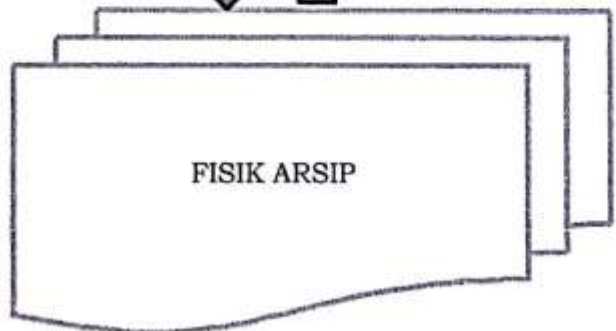
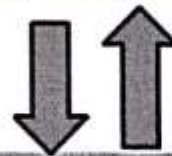
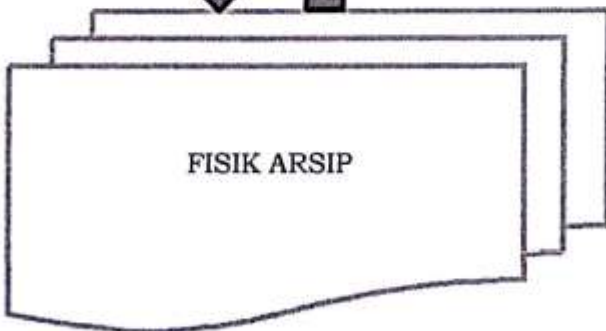
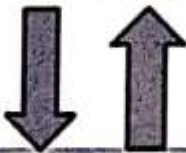
TIDAK

PENGGOLONGAN HAK ARSIP DINAMIS

1. PENENTU KEBIJAKAN
  - A. PIMPINAN TINGKAT TERTINGGI
  - B. PIMPINAN TINGKAT TINGGI (SATU TINGKAT DI BAWAH TINGKAT TERTINGGI)
  - C. PIMPINAN TINGKAT MENENGAH
2. PELAKSANA KEBIJAKAN
3. PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL
4. PUBLIK

PENGGOLONGAN HAK ARSIP DINAMIS

1. PENENTU KEBIJAKAN
  - A. TINGKAT TERTINGGI
  - B. PIMPINAN TINGKAT TINGGI (SATU TINGKAT DI BAWAH TINGKAT TERTINGGI)
  - C. PIMPINAN TINGKAT MENENGAH
2. PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL
3. PENEGAK HUKUM



PADA KOREKSI  
KABAG  
KASUBAG  
STAF



A. Identifikasi Ketentuan Hukum

Dalam melakukan identifikasi ketentuan hukum yang menjadi pedoman utama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Identifikasi ketentuan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan  
Pasal 44 ayat (1)

Pencipta arsip dapat menutup akses arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:

- a. menghambat proses penegakan hukum;
- b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiannya;
- e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri;
- g. mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;
- h. mengungkapkan rahasia atau pribadi; dan
- i. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pasal 44 ayat (2)

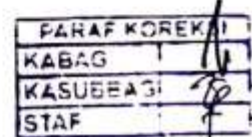
Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;





3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
  5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. sistem persandian negara; dan/atau
  7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. rencana awal investasi asing;
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  2. korespondensi diplomatik antarnegara;
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau



4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
  - g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
    1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
    2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
    3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
    4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
    5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  - j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27:
- a. ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
  - b. ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
  - c. ayat (3), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
  - d. ayat (4), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

#### Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

#### Pasal 30

- a. ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- b. ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- c. ayat (3), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan



### Pasal 31

- a. ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- b. ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- c. ayat (3), Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- d. ayat (4), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

### Pasal 32

- a. ayat (1), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- b. ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
- c. ayat (3), Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keuntuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

### Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

### Pasal 36

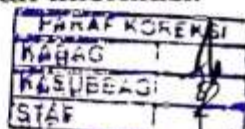
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

### Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Pasal 3 ayat (4)

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.





5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 168

- a. ayat (1), Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
- b. ayat (2), Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
- c. ayat (3), Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 189 ayat (2):

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan
  - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
  - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

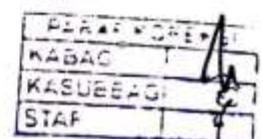
Pasal 18

- a. ayat (1), Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
- b. ayat (2), Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
- c. ayat (3), Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas pengiriman, penyaluran dan penyampaian informasi penting menyangkut:

- a. Keamanan negara;
- b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda;
- c. Bencana alam;





- d. Marabahaya; dan/atau
- e. Wabah penyakit.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 41

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan kegiatan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- a. ayat (1), Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jasa telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- b. ayat (2), Untuk keperluan proses pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
  - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- c. Ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40.

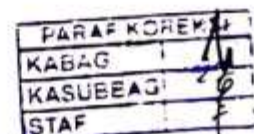
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Pasal 2

Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 3

- a. ayat (1), Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- b. ayat (2), Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- c. ayat (3), Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.





**B. Identifikasi Arsip melalui Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi dan Uraian Jabatan**

**1. Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi**

Analisis fungsi dalam organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang menjalankan fungsi baik substantif maupun fasilitatif dengan tujuan untuk menentukan fungsi strategis dalam organisasi.

Fungsi substantif atau utama adalah kelompok kegiatan utama suatu organisasi sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi fasilitatif adalah kelompok kegiatan pendukung yang terdapat pada setiap organisasi misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain.

Contoh arsip yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang mempunyai nilai setrategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain dalam struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, salah satu fungsinya adalah penyusutan arsip. Kegiatan yang tercipta dari fungsi tersebut antara lain Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Arsip, Daftar Arsip yang disusutkan, daftar Arsip yang dinilai, Rekomendasi Tim Penilai Arsip, Berita Acara Penyusutan dan Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip (apabila arsip dimusnahkan).

Analisis Fungsi dari unit kerja dalam organisasi dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

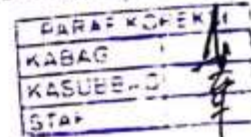
No	Unit Kerja	Fungsi	Kegiatan	Arsip Tercipta	Keterangan
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Pengelolaan Arsip	Penyusutan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Tim Penilai Arsip</li> <li>• Daftar Arsip yang disusutkan</li> <li>• Daftar Arsip yang dinilai</li> <li>• Rekomendasi Tim Penilai Arsip</li> <li>• Berita Acara Penyusutan</li> <li>• Surat Persetujuan Pemusnahan Arsip (apabila arsip dimusnahkan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> <li>• Dipertimbangkan terbuka</li> </ul>
			Penyusunan Peraturan Bupati	Peraturan Bupati (Arsip Statis)	Terbuka

Contoh arsip berdasarkan fungsi fasilitatif yang mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain:

- a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksanakan fungsi penyusunan pegawai, unit kepegawaian melaksanakan kegiatan penyusunan personil file diantaranya meliputi disiplin pegawai dan DP3/SKP. Arsip yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang bersangkutan dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privasi.
- b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi yaitu pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kegiatan administrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan diantaranya adalah daftar gaji dan daftar potongan gaji pegawai yang dapat dipertimbangkan arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai dan dapat menimbulkan kerugian yang serius terhadap masalah privasi.

**2. Uraian Jabatan**

Selain analisis fungsi unit organisasi, perlu didukung adanya analisis sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pengelola melalui





analisis uraian jabatan. Uraian Jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang diuraikan berdasarkan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam struktur organisasi.

Uraian Jabatan berbentuk dokumen formal yang berisi ringkasan tentang suatu jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan jabatan yang lain dalam suatu organisasi. Uraian jabatan disusun dalam suatu format yang terstruktur sehingga informasi mudah dipahami oleh setiap pihak yang berkaitan di dalam organisasi. Pada hakikatnya, uraian jabatan merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi, dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam uraian jabatan meliputi:

- a. Identifikasi Jabatan, berisi informasi tentang nama jabatan dan bagian dalam suatu organisasi;
- b. Fungsi Jabatan berisi penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi;
- c. Tugas-tugas yang harus dilaksanakan, bagian ini merupakan inti dari uraian jabatan; dan
- d. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima.

Penyusunan uraian jabatan harus dilakukan dengan baik agar mudah dimengerti, untuk itu diperlukan suatu proses terstruktur, yang dikenal dengan nama analisis jabatan.

Analisis jabatan adalah proses untuk memahami suatu jabatan dan kemudian menuangkannya ke dalam format agar orang lain mengerti tentang suatu jabatan.

Prinsip penting yang harus dianut dalam melakukan analisis jabatan, yaitu:

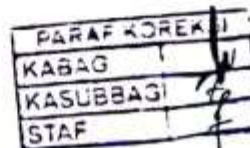
- a. Analisis dilakukan untuk memahami tanggung jawab setiap jabatan dan kontribusi jabatan terhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. Dengan analisis ini, maka uraian jabatan akan menjadi daftar tanggung jawab;
- b. Yang dianalisis adalah jabatan, bukan pemegang jabatan; dan
- c. Kondisi jabatan yang dianalisis dan dituangkan dalam uraian jabatan adalah kondisi jabatan pada saat dianalisis berdasarkan rancangan strategi dan struktur organisasi.

Dari analisis jabatan, dapat dilihat pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat/derajat klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akses arsip. Untuk itu, dapat digolongkan personil tertentu yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penyusunan, penanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi hak akses arsip.

Penggolongan personil untuk menjamin perlindungan pengamanan informasi dan mempunyai hak akses arsip dinamis terdiri dari penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pengawas.

Tanggung jawab tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penentu kebijakan
  1. menentukan tingkat/derajat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis;
  2. memberikan pertimbangan atau alasan secara tertulis mengenai pengklasifikasian keamanan dan penentuan hal akses arsip dinamis;
  3. menentukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan dalam mengamankan informasi dalam arsip dinamis yang telah diklasifikasikan keamanannya; dan
  4. menuangkan kebijakan, dasar pertimbangan, dan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam suatu pedoman, petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis.





b. Pelaksana kebijakan

1. memahami dan menerapkan klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sesuai dengan kewenangan yang sudah ditetapkan;
2. melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan;
3. merekam semua pelanggaran yang ditemukan;
4. melaporkan semua tindakan penyimpangan dan pelanggaran;
5. menjamin bahwa implementasi tingkat klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis telah dikoordinasikan dengan pejabat yang terkait secara tepat;
6. menjamin informasi yang berada dalam kendali pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap tingkat klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akses arsip dinamis telah dilindungi dari kerusakan fisik dan dari akses, perubahan, serta pemindahan ilegal berdasarkan standar keamanan; dan
7. mengidentifikasi semua kebutuhan dalam rangka menjamin keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis yang terdapat dalam arsip yang telah diklasifikasikan keamanannya.

c. Pengawas

1. menindaklanjuti pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan; dan
2. melaporkan semua dugaan pelanggaran dan penyimpangan kepada penentu kebijakan.

Contoh penggolongan personil dalam suatu organisasi untuk menjamin perlindungan keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis adalah:

- a. Penentu kebijakan adalah pejabat yang mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kedinasan ke luar dan ke dalam instansi seperti: Pimpinan tertinggi sampai dengan eselon 2 pada instansi Pemerintah Daerah atau eselon 3 pada instansi setingkat Bagian/ Kantor;
- b. Pelaksanaan kebijakan adalah pejabat pada unit kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas organisasi setingkat eselon 3 dan 4, seperti: Kepala Bidang/Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi
- c. Pengawas adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan tugas pengawasan, seperti: inspektur/auditor pada inspektorat, pengawas intern pada Satuan Pengawas Intern (SPI).

3. Analisis Risiko

Setelah dilakukan analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan uraian tugas, kemudian dilakukan analisis risiko.

Analisis risiko dipergunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifasian keamanan dan hak akses arsip dinamis karena apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak, kerugian dihadapi jauh lebih besar dari pada manfaatnya.

Risiko tersebut dapat berdampak terhadap keamanan individu, masyarakat, organisasi, dan negara.

Contoh : analisis risiko

- a. Arsip yang berhubungan dengan Perangkat Daerah Satpol PP misalnya arsip razia penertiban penyakit masyarakat dan penegakan PPNS (dijelaskan diatas ketentuan umum) mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya dirahasiakan.

Setelah dilakukan analisis risiko, hasil analisis menyimpulkan:

- 1) Jika arsip tersebut dibuka, maka dapat menimbulkan terganggunya

ketertiban umum dan individu serta fungsi penyelenggaraan

pemerintah Satpol PP tidak berjalan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	



- 2) Jika arsip ditutup, maka kemungkinan risiko yang dapat timbul tidak ada sehingga lebih baik dikategorikan rahasia.

Berdasarkan analisis risiko tersebut, kewenangan hak akses arsip dinamis hanya terdapat pada penentu kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

- b. Arsip rencana tata kota
  - 1) Bila arsip dirahasiakan, maka kemungkinan risiko yang akan timbul adalah disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang karena tidak ada kontrol dari masyarakat.
  - 2) Bila arsip diketahui oleh publik maka akan ada kontrol dan koreksi, sehingga lebih baik dikategorikan sebagai arsip biasa dan dapat diakses oleh masyarakat.

#### 4. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan

Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi dan uraian jabatan serta analisis risiko, dapat ditentukan kategori klasifikasi keamanan, yaitu:

- a. Sangat Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
- b. Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;
- c. Terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan;
- d. Biasa/Terbuka apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi setiap lembaga.

Di suatu lembaga, dimungkinkan untuk membuat paling sedikit 2 (dua) tingkat/derajat klasifikasi keamanan arsip dinamis. Setelah dibuat tingkat kategori klasifikasi keamanan arsip, selanjutnya dapat dituangkan dalam Daftar Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

#### 5. Penggolongan Hak Akses Arsip Dinamis

Berdasarkan identifikasi ketentuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam organisasi, analisis uraian jabatan, analisis risiko, dan penentuan kategori klasifikasi keamanan, dapat ditentukan penggolongan pengguna yang berhak mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu:

- a. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi
  - 1) Penentu Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pimpinan tingkat tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya.
    - b) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tertinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada



- pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin.
- c) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan tingkat tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu tingkat dengan unit di luar unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
- 2) Pelaksana kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.
  - 3) Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal/Inspektur Utama Kementerian/Lembaga dan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- b. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansi
- 1) Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori biasa/terbuka.
  - 2) Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).
  - 3) Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum.

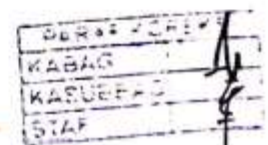
Dalam rangka pelaksanaan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengguna yang berhak untuk mengakses arsip dinamis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Pengguna yang berhak akses arsip dinamis

No	Tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses	Penentu Kebijakan	Pelaksana Kebijakan	Pengawas Internal/Eksternal	Publik	Penegak Hukum
1	Biasa/Terbuka	V	V	V	V	V
2	Terbatas	V	-	V	-	V
3	Rahasia	V	-	V	-	V
4	Sangat Rahasia	V	-	V	-	V

Keterangan Tabel 2

- a. Arsip Berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.
- b. Arsip Berklasifikasi Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.





- c. Arsip Berklasifikasi Terbatas, hak akses diberikan kepada pimpinan tingkat menengah dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum.
- d. Arsip Berklasifikasi Biasa/Terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

6. Pengamanan Tingkat Klasifikasi

Berdasarkan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, maka pencipta arsip mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalam penyimpanan dan penyampaian sebagai berikut:

1) Penyimpanan

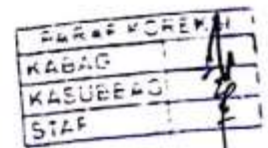
Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan memperhatikan media arsip.

2) Penyampaian

Penyampaian dalam rangka penanganan fisik maupun informasi arsip dinamis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4. Prosedur Pengiriman Informasi

NO	TINGKAT/DERAJAT KLASIFIKASI	ARSIP KONVENSIONAL	ARSIP ELEKTRONIK
1	2	3	4
1	Biasa / Terbuka	Tidak ada persyaratan prosedur khusus	Tidak ada prosedur khusus
2	Terbatas	Amplop segel	Apabila pesan elektronik atau email berisi data tentang informasi personal, harus menggunakan enkripsi, email yang dikirim dengan alamat khusus, password, dan lain-lain
3	Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda</li> <li>2. Diberi kode rahasia</li> <li>3. Menggunakan amplop dobel</li> <li>4. Amplop segel, stempel rahasia</li> <li>5. Konfirmasi tanda terima</li> <li>6. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/ dokumen rahasia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email</li> <li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia.</li> <li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi.</li> <li>4. Sangat Rahasia.</li> </ol>
4	Sangat Rahasia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan warna kertas yang berbeda.</li> <li>2. Menggunakan amplop dobel bersegel</li> <li>3. Audit jejak untuk setiap titik akses (misal: tanda tangan).</li> <li>4. Harus dikirim melalui orang yang sudah diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap pengendalian arsip/dokumen rahasia.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harus ada konfirmasi dari penerima pesan elektronik atau email</li> <li>2. Menggunakan perangkat yang dikhususkan bagi pesan elektronik atau email rahasia</li> <li>3. Menggunakan persandian atau kriptografi</li> <li>4. Harus ada pelacakan akses informasi untuk suatu pesan elektronik atau email.</li> </ol>





Catatan : ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi sangat rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia dan terbatas. Ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi rahasia meliputi juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas.

II. TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. Format Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Format daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dinamis terdiri atas: nomor, kode klasifikasi, jenis arsip, klasifikasi keamanan, hak akses, dasar pertimbangan, dan unit pengolah. Rincian lebih lanjut sebagai berikut:

Daftar Arsip Dinamis  
Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

No	Kode Klasifikasi	Jenis Arsip	Klasifikasi Keamanan	Hak Akses	Dasar Pertimbangan	Unit Pengolah
1	2	3	4	5	6	7

Pengesahan:  
Tempat, tanggal, bulan, tahun  
Jabatan  
Tanda tangan pejabat yang mengesahkan  
Nama

Keterangan :

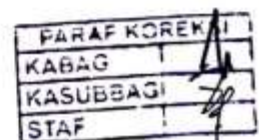
1. Kolom "Nomor" diisi dengan nomor urut;
2. Kolom "Kode Klasifikasi", diisi dengan kode angka, huruf atau gabungan angka dan huruf yang akan berguna untuk mengintegrasikan antara penciptaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip dalam satu kode yang sama sehingga memudahkan pengelolaan;
3. Kolom "Jenis Arsip" diisi dengan judul dan uraian singkat yang menggambarkan isi dari jenis/seri arsip;
4. Kolom "Klasifikasi Keamanan" diisi dengan tingkat keamanan dari masing-masing jenis/seri arsip yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas atau biasa/terbuka;
5. Kolom "Hak Akses" diisi dengan nama jabatan yang dapat melakukan pengaksesan terhadap arsip berdasarkan tingkat/derajat klasifikasi;
6. Kolom dasar pertimbangan, diisi dengan uraian yang menerangkan alasan pengkategorian arsip sebagai sangat rahasia, rahasia dan terbatas.
7. Kolom unit pengolah, diisi dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia dan terbatas.

B. Format Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

Langkah-langkah Penyusunan Daftar Arsip Dinamis berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses.

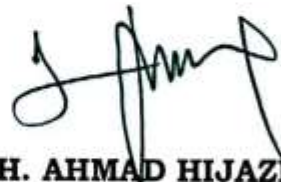
Penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses dilakukan dengan mempertimbangkan:





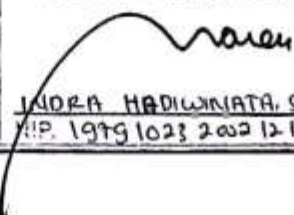
- a. Aspek ketentuan peraturan perundang-undangan dan Norma Standar Pedoman Kriteria masing-masing instansi;
  - b. Hasil analisis fungsi unit kerja dan *Job Description*; dan
  - c. Aspek analisis risiko.
2. Pencatuman Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses pada kolom daftar. Hasil penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis pada pencipta arsip dituangkan dalam kolom-kolom yang terdiri dari: nomor, kode klasifikasi, jenis arsip, klasifikasi keamanan, hak akses dan dasar pertimbangan dan unit pengolah.  
Kode klasifikasi dicantumkan apabila sudah dimiliki. Apabila belum, perlu dilakukan analisis fungsi untuk menentukan jenis arsip tanpa mengisi kolom kode klasifikasi.
  3. Pencatuman dasar pertimbangan  
Dasar pertimbangan dituangkan untuk mengetahui alasan mengapa arsip dikategorikan pada tingkat/derajat klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas.
  4. Menentukan unit pengolah  
Unit pengolah perlu dicantumkan dalam daftar guna mengetahui unit yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan informasi arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia dan terbatas.
  5. Pengesahan oleh Pimpinan Organisasi  
Pimpinan organisasi yang berwenang mengesahkan Daftar Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses arsip adalah pimpinan pencipta arsip.

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	/
ASISTEN	AP
KABAG	AP
KASUBBAG	AP
DINAS PEMRAKARSA	R

<b>N A S K A H</b> <b>PRODUK HUKUM INI</b> <b>TELAH DITELITI /</b> <b>DIKOREKSI OLEH</b> <b>BAGIAN ADM. HUKUM</b>	TGL :
	KABAG. ADM. HUKUM,  <b>INDRA HADIWINATA, S.T.</b> <small>P. 1979 1023 2002 12 1000</small>



Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019  
Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)  
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

I. UMUM		JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
NO KLASIFI KASI (1)	(2)					
1	000	UMUM				
	001	Lambang - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Kota / Kabupaten	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	002	Penghargaan - Bintang - Satya Lencana - Samakarya Nugraha - Monumen - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	003	Hari Raya / Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan-Idul Fitri-Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	004	Ucapan - Ucapan Terima Kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	006	Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	012	Rumah Dinas - Tanah untuk Rumah Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBER-01  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HIAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Perbotan				
	013	Mess / Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	014	Rumah Susun / Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	015	Penerangan Listrik / Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	016	Telepon / Faximile / Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	017	Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	018	Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	019	Protokol	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Upacara Bendera				
		- Tata Tempat				
		- Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden				
		- Audiensi				
		- Alamat-alamat Kantor dan Pejabat				
		- Sambutan				
		- Umbul-umbul / Spanduk				
3	020	PERALATAN				
		PERALATAN				
		- Penawaran, Ekspose				
	021	Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	022	Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	023	Perabot Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Foto				
		- Audio				
		- Video				
	045	Kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PERAF KOREKSI  
KABAG I  
KASUBSAG I  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Pola Klasifikasi - Pencatatan Berkas - Penyusunan Arsip - Jadwal Retensi Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan / Perawatan Arsip				
	046	Sandi - Peralatan - Sistem - Sumber Daya Manusia - Pembinaan Persandian	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis
6	050	PERENCANAAN PERENCANAAN - REPELITA - Pelita Daerah - Bantuan Pembangunan Daerah - Bappeda - Perencanaan / Proyek bidang peralatan - Bidang Perpustakaan - Bidang Kearsipan - Organisasi / Ketatalaksanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI / KETATALAKSANAAN				
	060	Organisasi Pemerintah - Susunan dan tata kerja - Tata Tertib Kantor, Jam Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan / Tata Naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis





NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum/Pelayanan Publik / Analisis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi / Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
8	070	<b>PENELITIAN</b>				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten / Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan / Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9	080	<b>KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR</b>				
	082	Bupati / Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
10	090	<b>PERJALANAN DINAS</b>				
	094	Perjalanan Pejabat ke dalam dan ke luar Daerah, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
II.	<b>PEMERINTAHAN</b>					
100	<b>PEMERINTAHAN</b>					
1	130	<b>PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA</b>				
	131	Bupati / Walikota meliputi				
		- Pecalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Meninggal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Memori Kepala Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	131	Sambutan / Pengarahan / Alamat	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	132	Wakil Bupati / Walikota meliputi				
		- Pecalonan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pelantikan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREK  
KABAG  
KASUBSAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Pemberhentian - Serah Terima Jabatan - Berita Acara Serah Terima Jabatan	Terbuka Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	133	Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota meliputi - Pencalonan - Pengangkatan - Meninggal - Pelantikan - Pemberitahuan	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	134	Forum Koordinasi Pemerintah Daerah - Muspida - Forum Koordinasi Lainnya - Kerjasama antar Kabupaten / Kota	Terbuka Terbatas Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	135	Pembentukan / Pemecaran Wilayah - Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati / Walikota - Perubahan Batas Wilayah - Pemecaran Wilayah - Permasalahan Batas Wilayah - Pembentukan Ibukota / Kabupaten - Pemberian dan Penggantian Nama Kota, daerah, Jalan	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	136	Pembagian Wilayah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	137	Penyerahan Urusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	138	Pemerintah Wilayah Kecamatan - Sambutan/Pengarahan/Amanat - Pembentukan Kecamatan - Pemecaran Kecamatan - Perluasan / Perubahan Batas Wilayah Kecamatan - Pembentukan Perwakilan Kecamatan	Terbuka Terbuka Terbuka Terbatas Terbatas Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	139	Laporan - Monitoring - Evaluasi	Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
2	140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi : Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, - Pemberhentian dan sebagainya.	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

FARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO (1)	KLASIFI KASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
	143	Kekayaan Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa / Kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/ Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa / Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pembentukan Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pemekaran Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Perubahan Batas Wilayah / Perluasan / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Perubahan Nama Desa / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Kerjasama antar Kabupaten / Kelurahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, Jangan Klasifikasikan di sini lihat (410) dg rinciannya	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Kepala Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Staf Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Rukun Tetangga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Rukun Warga	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD KABUPATEN / KOTA				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pecalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pemberhentian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pelenggaraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	172	Persidangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Reses	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	173	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Penghargaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	174	Hak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	175	Sekretaris DPRD Kabupaten / Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM				
		- Konstitusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Dasar Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Amnesti, Abolisi dan Grasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	181	Perdata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

FARAF KOREMSI  
KABAG  
KASUBSAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Rumah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Utang/Piutang	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Gadai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Hipotik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Notariat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	182	Pidana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	183	Peradilan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Bantuan Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	185	Imigrasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Visa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Paspport	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Lintas Batas / Batas antar Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Peraturan Kabupaten	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Keputusan Bupati	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

### III. POLITIK

1	200	<b>POLITIK</b>				
		- Kebijakan Umum	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Orde Baru	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Reformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	210	<b>KEPARTAJIAN</b>				
		Meliputi :	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembubaran				
		- Lambang Partai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Kartu Tanda Anggota	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Bantuan Keuangan Parpol	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	2	<b>220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				
		221 - Berdasarkan Perjuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Berkas tentang Perjuangan Perintis kemerdekaan				
		- Berkas tentang perjuangan angkatan 45				
		- Berkas tentang perjuangan Veteran				
	222	- Berdasarkan Kekayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Kekayaan Pepabri				
		- Kekayaan Wredatama				

PARAF MURAH BI  
 KABALU  
 KASUBERANGI  
 PIAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	223 - Berdasarkan Kerohanian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	224 - Lembaga Adat		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>3</b>	<b>230</b>	<b>ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL</b>				
	231 - Ikatan Dokter Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	232 - Persatuan Guru Republik Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	233 - Persatuan Sarjana Hukum Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	234 - Persatuan Advokat Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	235 - Lembaga Bantuan Hukum Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	236 - Korps Pegawai Republik Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	237 - Persatuan Wartawan Indonesia		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	238 - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	239 - Organisasi Profesi dan Fungsional lainnya		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>4</b>	<b>240</b>	<b>ORGANISASI PEMUDA</b>				
	241 - Organisasi Kepemudaan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	242 - Organisasi Mahasiswa		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	243 - Organisasi Pelajar		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	244 - Organisasi Pemuda Keagamaan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>250</b>	<b>ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN</b>				
	251 - Organisasi Buruh Nasional		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	253 - Organisasi Tani		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	254 - Organisasi Nelayan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	255 - Organisasi angkutan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>260</b>	<b>ORGANISASI WANITA</b>				
	261 - Dharma Wanita		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	262 - Persatuan Wanita Indonesia		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	263 - Pemberdayaan Perempuan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	264 - Kongres Wanita		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	265 - Organisasi Wanita Keagamaan		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
<b>7</b>	<b>270</b>	<b>PEMILIHAN UMUM</b>				
	271 - Pencalonan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	272 - Nomor Urut Partai / Tanda Gambar		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	273 - Kampanye		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	274 - Petugas Pemilu		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	275 - Pemilihan / Daftar Pemilih		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	276 - Sarana		Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	- Sarana TPS					

FARAF KRENSI  
 KABAG  
 KASUBSAG  
 STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Sarana Kendaraan				
		- Surat Suara				
		- Kotak Suara				
	277	Pemungutan Suara / Perhitungan Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	278	Penetapan Hasil Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
8/280		<b>PILKADA</b>				
	280	Pengucapan Sumpah Janji DPRD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	282	Nomor urut Partai / Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	283	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	284	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	285	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	286	- Sarana	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Sarana TPS				
		- Sarana Kendaraan				
		- Surat Suara				
		- Kotak Suara				
	287	Pemungutan Suara / Penghitungan Suara	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9/290		<b>KOMISI PEMILIHAN UMUM / BAWASLU</b>				
	291	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		<b>IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN</b>				
1/300		<b>KEAMANAN/KETERTIBAN</b>				
	301	- Keamanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	302	- Ketertiban	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
4/330		<b>KEAMANAN</b>				
	337	- Pengaduan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	338	- Hibauan/Iarangan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
5/340		<b>PERTAHANAN SIPIL</b>				
	341	- Perlindungan Sipil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
6/350		<b>KEJAHATAN</b>				
	351	- Makar/Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Re	Bidang Teknis
	352	- Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Re	Bidang Teknis
	353	- Penganiayaan, pencurian	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Re	Bidang Teknis
	354	- Subversi/Penyelundupan/Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Re	Bidang Teknis
	355	- Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Re	Bidang Teknis
	356	- Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	357	- Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KOP  
 KABAG  
 KASUBSASI  
 STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	358	- Kenakalan	Terbata	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	359	- Kejahatan Lainnya	Terbata	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
7	360	<b>BENCANA</b>				
	361	- Gunung berapi/gempa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	362	- Banjir/tanah longsor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	364	- Kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Pemadam Kebakaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	365	- Kekeringan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
8	370	<b>Kecelakaan/SAR</b>				
	371	- Darat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	372	- Udara	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	374	- Sungai / danau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

**V. KESEJAHTERAAN RAKYAT**

1	400	<b>KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
	401	- Keluarga Miskin	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	402	- PNPM Mandiri Pedesaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
2	410	<b>PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN</b>				
	411	<b>PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG</b>				
		a. Swadaya Gotong Royong				
		1) Penataan gotong royong	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		2) Gotong royong dinamis				
		3) Gotong royong statis				
		4) Pungutan				
		b. Lembaga Sosial Desa (LSD)				
		1) Pembinaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		2) Klasifikasi				
		3) Proyek				
		4) Musyawarah				
		c. Latihan Kerja Masyarakat				
		1) Kader masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		2) Kuliah Kerja Nyata (KKN)				
		3) Pusat Latihan				
		4) Kursus-kursus				
		5) Kurikulum/syllabus				

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		6) Keterampilan				
		7) Pramuka				
		d Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Program				
		2) Pembinaan Organisasi				
		3) Kegiatan				
		e. Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Publikasi				
		2) Peragaan				
		3) Sosio drama				
		4) Siaran Pedesaan				
		5) Penyuluhan lapangan				
		f. Kelembagaan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kelompok tani				
		2) Rukun tani				
		3) Subak				
		4) Dharmia Tirta				
		412 PEREKONOMIAN DESA				
		a. Produksi Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengolahan				
		2) Pemasaran				
		b. Keuangan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkreditan desa				
		2) Inventarisasi data				
		3) Perkembangan/pelaksanaan				
		4) Bantuan/stimulans				
		5) Petunjuk/pembinaan pelaksanaan				
		c. Koperasi Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Badan Usaha Milik Desa (BUMD)				
		2) Koperasi Usaha Desa (KUD)				
		d. Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Jumlah Desa yang diberi bantuan				
		2) Pengarahannya				
		3) Pusat				

PERAF OPSI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO (1)	KLASIFI KASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	IAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4) Daerah				
		e. Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pusat				
		2) Daerah				
		f. Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Bantuan langsung				
		2) Bantuan keserasian				
		3) Bantuan juara lomba desa				
		413 PRASARANA DESA				
		a. Prasarana Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pembinaan				
		2) Bimbingan teknis				
		b. Pemukiman Kembali Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Lokasi				
		2) Diskusi				
		3) Pelaksanaan				
		c. Masyarakat Pradesa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pembinaan				
		2) Penyuluhan				
		d. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Rumah Sehat				
		2) Proyek perintis				
		3) Pelaksanaan				
		4) Pengembangan				
		5) Perbaikan kampung				
		414 PENGEMBANGAN DESA				
		a. Tingkat Perkembangan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Jumlah desa				
		2) Pemekaran desa				
		3) Pembentukan desa baru				
		4) Evaluasi				
		5) Bagan				
		b. Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penyuluhan program				

PURAFKOPENG  
KABAG  
KASUBSAGI



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2) Lokasi UDKP				
		3) Pelaksanaan				
		4) Bimbingan/pembinaan				
		5) Evaluasi				
		c. Tata Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Inventarisasi				
		2) Penyusunan Pola Tata Desa				
		3) Aplikasi tata desa				
		4) Pemetaan				
		5) Pedoman pelaksanaan				
		6) Evaluasi				
		d. Perlombaan Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pedoman				
		2) Penilaian				
		3) Kejuaraan				
		4) Piagam				
	415	COORDINASI				
		a. Sektor khusus	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
3	420	PENDIDIKAN				
		421 SEKOLAH				
		a. Pra Sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Kegiatan Sekolah, Dics Natalis, Lustrum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Kegiatan pelajar	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Reuni, darmawisata				
		2) Resimen Mahasiswa (MENWA)				
		h. Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		i. Pendidikan Luar Sekolah/ Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	422	ADMINISTRASI SEKOLAH				
		a. Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis





NO (1)	KLASIFI KASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		b. Tahun Pelajaran c. Hari Libur d. Uang Sekolah e. Bea Siswa	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	423	METODE BELAJAR a. Kuliah b. Ceramah, simposium c. Diskusi d. Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour e. Kurikulum f. Karya Tulis g. Ujian	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rektor dan guru teladan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	425	SARANA PENDIDIKAN a. Gedung 1) Gedung Sekolah 2) Kampus 3) Pusat kegiatan mahasiswa b. Buku c. Perlengkapan Sekolah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	426	KEOLAHRAGAAN a. Cabang Olah Raga b. Sarana 1) Gedung Olah Raga 2) Stadion 3) Lapangan 4) Kolam Renang c. Pesta Olah Raga d. KONI	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	428	KEPRAMUKAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

FARAF-CREKS  
KABAG  
KASUEBAG  
STAF

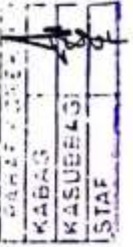


NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	430	KEBUDAYAAN				
		KESENIAN				
		a. Cabang Kesenian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Sarana	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	432	KEPURBAKALAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
	433	SEJARAH	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	434	BAHASA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	435	USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENIANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	436	KEPERCAYAAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
5	440	KESEHATAN				
	441	PEMBINAAN KESEHATAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Gizi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Mata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c. Jiwa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d. Kanker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Perawatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		h. Masyarakat (PKM)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		i. Pekan Imunisasi Nasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	442	OBAT-OBATAN				
		a. Pengadaan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Penyimpanan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	443	PENYAKIT MENULAR				
		a. Pencegahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b. Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kusta				
		2) Kelamin				
		3) Frambrosia				
		4) TBC/AIDS/HIV				
		c. Epidemologi dan Karantina (Epidka)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kholera				
		2) Imunisasi				
		3) Surveilense				
		4) Rabies/anjing gila, Antraks				

FAHIF ADEVA  
KABAG  
KASUBRAGI  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		d Pemberantasan & Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Malaria				
		2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF)				
		3) Filaria				
		4) Serangga				
		e. Hygiene Sanitasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Tempat-tempat Pembuatan dan Penjualan makanan dan minuman (TPPMM)				
		2) Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga)				
		3) Pestisida				
444	GIZI		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar				
		b. Keracunan Makanan				
		c. Menu Makanan Rakyat				
		d. Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)				
		e. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)				
445	RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
446	TENAGA MEDIS		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
448	PENGOBATAN TRADISIONAL		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Pijat				
		b. Tusuk Jarum				
		c. Jamu tradisional/herbal				
		d. Dukun/paranormal				
6	AGAMA					
451	ISLAM		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Peribadatan				
		1) Sholat				
		2) Zakat, Fitrah				
		3) Puasa				
		4) MTQ				
		b. Rumah Ibadah				
		c. Tokoh Agama				
		d. Pendidikan				
		1) Tinggi				
		2) Menengah				





NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Dasar				
		4) Pondok Pesantren				
		5) Gedung Sekolah				
		6) Tenaga Pengajar				
		7) Buku				
		8) Dakwah				
		9) Organisasi/Lembaga Pendidikan				
		e. Harta Agama	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f. Peradilan	Tebatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g. Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				
		h. Mazhab	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	452	KRISTEN PROTESTAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	453	KATHOLIK	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	454	HINDU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	455	BUDHA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	456	URUSAN HAJI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. ONH				
		b. Umroh				
		c. Manasik				
7	460	SOSIAL				
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Cacat mata				
		b. Cacat Tubuh				
		c. Cacat Mental				
		d. Bisu Tuli				
	462	TUNA SOSIAL	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Gelandangan				
		b. Pengemis				
		c. Tuna Susila				
		d. Anak nakal/anak jalanan				
	463	KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		a. Anak Putus Sekolah				
		b. Ibu Teladan				
		c. Keluarga Sakinah				
		d. Anak asuh				

KABAG  
KASUBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
464	PEMBINAAN PAHLAWAN		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	a. Pahlawan					
	b. Perintis kemerdekaan					
	c. Cacat veteran					
465	KESEJAHTERAAN SOSIAL		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	a. Lanjut usia					
	b. Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi					
466	SUMBANGAN SOSIAL		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	a. Korban Bencana					
	b. Pencairan dana untuk sumbangan					
	c. Pantai Asuhan					
	d. Pantai Jompo					
467	BIMBINGAN SOSIAL		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
468	PMI		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
469	MAKAM		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	a. Umum					
	b. Pahlawan					
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
	a. Identitas Penduduk		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Biodata					
	2) Nomor Induk Kependudukan					
	3) Kartu Tanda Penduduk					
	4) Kartu Keluarga					
	5) Advokasi Identitas Penduduk					
	b. Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia		Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Perpindahan penduduk WNI					
	2) Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia					
	3) Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara					
	4) Daerah terbelakang					
	5) Bedol Desa					
	c. Perpindahan Penduduk Antar Negara		Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penduduk Indonesia ke luar negeri					
	2) Orang asing tinggal sementara					

PARAF  
KABAG  
KASUBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Orang asing tinggal tetap				
		d Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Akibat bencana alam				
		2) Akibat kerusuhan sosial				
		3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang				
		4) Pendaftaran penduduk rentan				
472		PENCATATAN SIPIL				
		a. Kelahiran, Kematian, dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kelahiran				
		2) Kematian				
		3) Advokasi kelahiran dan kematian				
		4) Perkawinan, perceraian dan advokasi				
		b. Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkawinan agama non Islam				
		2) Perceraian agama Islam				
		3) Perceraian agama non Islam				
		4) Advokasi perkawinan dan perceraian				
		c. Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta perubahan dan pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengangkatan Anak				
		2) Pengakuan Anak				
		3) Pengesahan Anak				
		4) Perubahan Akta				
		5) Pembatalan Akta				
		6) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan DNA, pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
		d. Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Akibat Perkawinan				
		2) Akibat Kelahiran				
		3) Non Perkawinan				
		4) Non Kelahiran				
		5) Perubahan WNI ke WNA				
		6) Perubahan WNA ke WNI				
473		INFORMASI KEPENDUDUKAN				
		a. Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREF.   
 KABAG   
 KASUBBAGI   
 STAF





NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		1) Perangkat Keras				
		2) Perangkat Lunak				
		3) Jaringan komunikasi data				
		b Ketelmbagaan dan Sumber Daya Informasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Daerah maju				
		2) Daerah berkembang				
		3) Daerah terbelakang				
		c. Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pendaftaran penduduk				
		2) Kejadian vital penduduk				
		3) Penduduk non registrasi				
		d Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Media elektronik				
		2) Media cetak				
		3) Outlet				
474		PERKEMBANGAN PENDUDUK				
		a. Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Struktur jumlah				
		2) Komposisi				
		3) Fertilitas				
		4) Kesehatan reproduksi				
		5) Morbiditas penduduk				
		6) Mortalitas penduduk				
		b Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Anak dan remaja				
		2) Penduduk usia produktif				
		3) Penduduk usia produktif				
		4) Gender				
		c. Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Migrasi antar wilayah				
		2) Migrasi internasional				
		3) Urbanisasi				
		4) Sementara				
		5) Migrasi non permanen				
		d Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk				
		2) Pelayanan ketelmbagaan ekonomi				

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3) Pelayanan kelembagaan sosial budaya 4) Partisipasi masyarakat e. Pengembangan Wawasan Kependudukan 1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
475		<b>PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN</b> a. Indikator Kependudukan 1) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator 2) Pemanfaatan indikator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan b. Proyeksi Penduduk 1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan c. Analisis Dampak Kependudukan 1) Penyusunan pengembangan analisis 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan d. Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah 1) Lembaga Internasional 2) Lembaga masyarakat dan nirlaba 3) Lembaga usaha swasta e. Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah 1) Lembaga Pemerintah 2) Pemerintah Kabupaten f. Analisis 476 MONITORING 477 EVALUASI 478 DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	<b>MEDIA MASSA</b> 481 PENERTIBAN 1) Surat kabar 2) Majalah 3) Buku	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREK:  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO (1)	KLASIFI KASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		4) Penerjemahan				
482		RADIO	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
483		TELEVISI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
484		FILM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
485		PERS 1) Kewartawanan 2) Wawancara 3) Informasi nasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
486		GRAFIKA	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
487		PENERANGAN Berkas tentang pameran non komersil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
488		OPERATION ROOM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
489		HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KCFEY  
KABAG  
KASUBRAGI  
STAF





VI. PEREKONOMIAN		JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
NO	KLASIFI KASI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	500	PEREKONOMIAN				
		Dewan Stabilitas				
	501	- PENGADAAN PANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	502	- PENGADAAN SANDANG	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	503	- Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang klasifikasi pada masalahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
2	510	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
		- Promosi Perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pekan Raya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Iklan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pameran / Non Komersil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pelelangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tera / Timbang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	511	Pemasaran				
		- Sembilan Bahan Pokok	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pasar Tradisional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pasar Modern	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	512	EKSPOR				
	513	IMPOR				
	514	PERDAGANGAN ANTAR PULAU				
	515	PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	516	PERGUDANGAN, TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORENG				
	517	ANEKA USAHA PERDAGANGAN				
	518	KOPERASI (UNTUK BUUD.KUD.KUR)				
3	520	PERTANIAN				
	521	Tanaman Pangan				
		- Program				
		- Bimas/Inmas termasuk Kredit	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Penyuluhan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Produksi				
		- Padi / Panen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Palawija	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Jagung	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Ketela Pohon / Ubi-ubian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Hotikultura	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Soyuran / Buah-buahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tanaman Hias	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pembudidayaan Rumpun Laut	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

DASAR PERESTI  
 KABAG  
 KASUBBAG  
 STAF











NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	IAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Tembakau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tebu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Cengkeh	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kopra	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kopi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Cokelat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Aneka Tanaman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>4</b>	<b>530</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>				
		- Undang-undang Gangguan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	531	- Industri Logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	532	- Industri Mesin / Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	533	- Industri Kimia /Farmasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	534	- Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	535	- Industri Makanan / Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	536	- Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	537	- Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	538	Usaha Negara/BUMN				
		- Perusahaan Jawatan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perusahaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	539	- Perusahaan Daerah/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>540</b>	<b>PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN</b>				
	541	- BBM/Minyak bumi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	542	Gas Bumi				
		- Eksploitasi/Pengeboran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	543	Aneka Tambang				
		- Timah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Aluminium, Boxit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Besi, tembaga & Batu bara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	544	Logam Mulia				
		- Emas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Intan / Batu Mulia	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perak	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	545	Logam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	546	Geologi				
		- Vulkanologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pengawasan Gunung Berapi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KOFER  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	547	- Sumur Artesis, Air bawah tanah - Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>6</b>	<b>550</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>				
	551	Perhubungan Darat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Lalulintas Jalan Raya, Sungai, Danau	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Keamanan Lalulintas, rambu-rambu	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Angkutan Jalan Raya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perizinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Terminal	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perkeretaapian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	554	Pos	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	555	Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Telepon, HT	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Telegram	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Telex/SSB, Faximile	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Satelit, Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Stasiun Bumi, Parabola	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Menara Telekomunikasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	556	Parwisata dan Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Obyek Kepariwisata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perhotelan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Travel Service	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tempat Rekreasi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tempat Sejarah /Monumen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	557	Meteorologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Ramalan Cuaca	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Curah Hujan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kemarau Panjang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>7</b>	<b>560</b>	<b>TENAGA KERJA</b>				
	560	Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pengangguran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	561	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	562	Pencematan Tenaga Kerja, TKI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	563	Latihan Kerja, Magang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	564	Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Butsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Padat Karya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	565	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis



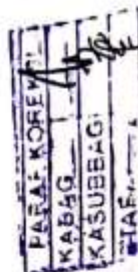


NO	KLASIFIKASI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	566	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	567	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	568	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	569	Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
<b>8</b>	<b>570</b>	<b>PERMODALAN</b>				
	570	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	571	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	572	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	573	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	574	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	575	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
<b>9</b>	<b>580</b>	<b>PERBANKAN / MONETER</b>				
	581	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	582	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	583	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	584	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	585	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	586	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	587	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	588	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	589	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
<b>10</b>	<b>590</b>	<b>AGRARIA</b>				
	591	Tata Guna Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Pemetaan dan Pengukuran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Perpetaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Penyediaan Data	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Fatwa Tata Guna Tanah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Tanah Kritis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	592	Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Redistribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Penentuan Tanah Obyek Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Pembagian Tanah Obyek Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Sengketa Redistribusi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Tanah Obyek Landreform	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Ganti Rugi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Ganti Rugi Tanah Kelebihan, meliputi Sengketa ganti rugi tanah kelebihan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Ganti Rugi Tanah Absentee, meliputi Sengketa ganti rugi tanah absentee	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Ganti Rugi Tanah Partikelir, meliputi Sengketa ganti rugi tanah partikelir	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
		- Bagi Hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis

PARA-KORPRI  
KABAG  
KASUBRAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pencatapan Imbangan Bagi Hasil		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Sengketa Perjanjian Bagi Hasil		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Gadai Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pelaksanaan Gadai Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Sengketa Gadai Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Bimbingan dan Penyuluhan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pengembangan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Yayasan Dana Landreform (YDL)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	593					
	- Pengurusan Hak -Hak Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Sewa Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Sewa Tanah utk Tanaman tertentu : tebu, tembakau, rosella corchorus		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Hak Milik		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perorangan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Hak Pakai		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perorangan, Warga Negara Asing (WNA)		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum Indonesia		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Tanah Gedung-gedung Negeri		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Guna Usaha		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perkebunan Besar		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perkebunan Rakyat		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Peternakan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perikanan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Kebutuhan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Hak Guna Bangunan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perorangan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- P3MB ( Panitia Penguasaan Milik Belanda )		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Badan Hukum Asing Belanda-PRK No. 5165		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pemulihan Hak ( PerPres 4 /1960 )		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Hak Pengelolaan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- PN Perummas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Sengketa Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Peradilan Perkara Tanah ( lihat klasifikasi 183 )		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis
	- Pemcabutan dan Pembebasan Tanah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas & fungsi OPD	Bidang Teknis













NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pelimpah samping				
		- Bangunan Pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gorong-gorong pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Talaang pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Syphon pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jembatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tangga cuci	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kubangan kerbau	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Waduk lapangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan penunjang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jaringan telepon	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Stasiun agro	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	611	Folder	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tanggul keliling	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanggul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan penutup sungai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jembatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan Pembawa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Stasiun pompa pemasukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan bagi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gorong-gorong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Syphon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan Pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Stasiun pompa pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pintu air pembuangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gorong-gorong pembuangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Syphon pembuangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Rumah petugas eksploitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	612	Pasang Surut	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan Pembawa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KOPRES  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan pintu pemasukan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan pintu pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kolam pasang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jembatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	613	Pengendalian Sungai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan pengaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanggul banjir	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pintu pengatur banjir	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Klep pengatur banjir	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tembok pengaman talud	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Krib	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kantung lumpur	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Check-dam	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Syphon	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Saluran pengaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran banjir	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Saluran drainage	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Corepure	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Warning system	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Stasiun	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	614	Pengamanan Pantai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tanggul	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Krib	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	615	Air Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Stasiun pompa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan pembawa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan pembuang	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
3	620	JALAN KOTA	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Daerah Pengawasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	• Tanaman		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Bangunan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan Sementara		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Jalan sementara		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Jembatan sementara		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Kantor proyek		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Gudang proyek		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Barak kerja		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Laboratorium lapangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Rumah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Badan Jalan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pekerjaan Tanah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Stabilitas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Perkerasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lapis pondasi bawah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lapis pondasi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lapis permukaan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Drainage		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Parit Tanah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Gorong-gorong		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Buku Trottoir		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Tanah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Perkerasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pasangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Median		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Tanah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Tanaman		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Perkerasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pasangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Daerah Samping		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Tanaman		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pagar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan pelengkap dan pengamanan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Rambu-rambu / tanda lalu lintas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lampu penerangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lampu pengatur lalu lintas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Patok-patok KM		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Patok-patok ROW (Sempadan)		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KORESI  
KABAG  
KASUBSAG  
Staf



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rel pengamanan</li> <li>• Pagur</li> <li>• Turap, Penahan</li> </ul>	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bronjong	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
			Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	62	JALAN LUAR KOTA	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Daerah Penguasaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan Sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jalan sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jembatan sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kantor proyek	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gudang proyek	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Barak kerja	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Laboratorium lapangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Rumah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Badan Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pekerjaan Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Stabilisasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Perkerasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lapis pondasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lapis pondasi bawah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lapis permukaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Drainage	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Parit	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gorong-gorong	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Sub drainage	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Trotoar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Perkerasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Median	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Perkerasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pasangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Daerah Samping	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pagar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan pelengkap dan pengaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Rambu-rambu / tanda lalu lintas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lampu penerangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lampu lalu lintas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Patok-patok KM	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Patok-patok ROW	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Rel pengamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pagar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Turap Pengaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bronjong	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
4	630	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Daerah Pengusahaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tanaman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan Sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jalan sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jembatan sementara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kantor proyek	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gudang proyek	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Barak kerja	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Laboratorium lapangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Rumah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pekerjaan tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Galian tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Timbunan tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pondasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pondasi kepala jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pondasi pilar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Angker	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan bawah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Kepala jembatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Pilar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Piloan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Landasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bangunan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gelagar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Lantai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Perkerasan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KORESI  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF







NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Pondasi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pondasi kepala jalan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pondasi Pilar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Angker		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan Bawah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Kepala jembatan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pilar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pilon		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Landasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan Atas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Gelagar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lantai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Perkerasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Jalan orang/Trotoar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Sandaran		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Talang Air		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan Pengamanan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Turap / penahan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Bronjong		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Strek dam		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Kist Dam		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Corepure		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Krib		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Bangunan Pelengkap		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Rambu-rambu / Tanda lalu lintas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lampu penerangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Lampu lalu lintas		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Patok-patok KM		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Patok-patok ROW		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Rel-rel pengaman		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pagar		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Oprit		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Badan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Perkerasan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Drainage		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Baku		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Median		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
5640	BANGUNAN PEMERINTAH		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Gedung pengadilan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KORESI  
KABAG  
KASUBAG  
STAF







NO	KLASIFIKASI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	IAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
649	Elemen Bangunan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Pondasi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Diatas Tiang		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Dinding		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Penahan beban		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Tidak Menahan beban		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Atap		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Lantai / Langit-langit		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Suspended		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Solit		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Pintu/Jendela		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pintu Harmonik		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pintu biasa		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pintu sorong		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Pintu kayu		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	• Jendela Sorong		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Jendela Vertikal		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
6	650	TATA KOTA	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	Daerah Perdagangan / Pelabuhan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Daerah Pusat Perbelanjaan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Daerah Perkotaan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	651 Daerah Pemerintah		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	653 Daerah Perumahan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Kepadatan rendah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Kepadatan tinggi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	654 Daerah industri		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Industri berat		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Industri ringan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Industri rumah		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	655 Daerah Rekreasi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Taman kota		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Tempat olah raga dan bermain		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Ruang terbuka		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	656 Transportasi		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Jaringan jalan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Penerangan jalan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Jaringan kereta api		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	- Jaringan sungai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUBSAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	657	Assainering - Saluran Pengumpulan - Instalasi Pengolahan • Bangunan • Unit Desinfektan - Unit Perpompaan	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
	658	Kesehatan Lingkungan - Persampahan • Bangunan pengumpul • Bangunan pemusnahan - Pengotoran Udara - Pengotoran Air • Air buangan industri - Kegaduhan / Polusi Udara - Kebersihan Kota	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
7	660	TATA LINGKUNGAN DAERAH HUTAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
8	670	KETENAGAAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		Listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kelistrikan • Kelistrikan PLN • Kelistrikan Non PLN	Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
		- Pembangkit Tenaga Listrik • PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) • PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) • PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas • PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) • PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) • PLTPU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis
		- Transmisi Tenaga Listrik • Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo • Saluran udara tegangan tinggi • Kabel bawah tanah	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis Bidang Teknis

PARAF KEPALA  
KABAG  
KASUBAG  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Distribusi Tenaga Listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Gardu distribusi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tegangan rendah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Tegangan menengah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Jaringan bawah tanah	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pengusahaan Listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Sambungan listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Penjualan tenaga listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Tarif Listrik	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	674	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	675	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
9	680	PERALATAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
10	690	AIR MINUM	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		Intake	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Broncaptering	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Sumur	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bendungan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Saringan (Screen)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Pintu Air	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Saluran Pembwa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Katup Udara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		• Katup Pelepas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Bak Pelepas Tekanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>VIII. PENGAWASAN</b>						
1	700	PENGAWASAN				
	700	- Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	701	- Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	- Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	- Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	- Bidang Perpustakaan /Dokumentasi /Kearsipan /Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	- Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	707	- Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	- Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	- Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
2	710	BIDANG PEMERINTAHAN				
	713	- Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	714	- Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

PARAF K. K. K. K.  
KABUPATEN  
KASUBIDGABDI  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	717 -	Bidang DPRD Kabupaten /Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	718 -	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>3</b>	<b>BIDANG POLITIK</b>					
	721 -	Bidang Keparitahan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	722 -	Bidang Organisasi Kemasyarakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	723 -	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	724 -	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	725 -	Bidang Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	726 -	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	727 -	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>4</b>	<b>BIDANG KEAMANAN /KETERTIBAN</b>					
	731 -	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	732 -	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	733 -	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	734 -	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	735 -	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	736 -	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	737 -	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					
	741 -	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	742 -	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	743 -	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	744 -	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	745 -	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	746 -	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	747 -	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	748 -	Bidang Media Massa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>5</b>	<b>BIDANG PEREKONOMIAN</b>					
	751 -	Bidang Perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	752 -	Bidang Pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	753 -	Bidang Perindustrian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	754 -	Bidang Pertambangan / Kesamudraan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	755 -	Bidang Perhubungan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	756 -	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	757 -	Bidang Permodalan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	758 -	Bidang Tentang Perbankan /Moneter	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	759 -	Bidang Tentang Agraria	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>7</b>	<b>BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>					
	761 -	Bidang Pengairan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	762 -	Bidang Jalan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis

FARAF KOREKSI  
KABAG  
KASUEBAGI  
STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	763 - Bidang Jembatan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	764 - Bidang Bangunan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	765 - Bidang Tata Kota		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	766 - Bidang Lingkungan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	767 - Bidang Ketenangan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	768 - Bidang Peralatan		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	769 - Bidang Air Minum		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
8	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>					
	781 - Bidang Pengadaan Pegawai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	782 - Bidang Mutasi Pegawai		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	783 - Bidang Kedudukan Pegawai		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	784 - Bidang Kesejahteraan Pegawai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	785 - Bidang Cuti		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	786 - Bidang Penilaian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	787 - Bidang Tata Usaha Kepegawaian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	788 - Bidang Pemberhentian Pegawai		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	789 - Bidang Pendidikan Pegawai		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
9	<b>BIDANG KEUANGAN</b>					
	791 - Bidang Anggaran		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	792 - Bidang Otorisasi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	793 - Bidang Verifikasi		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	794 - Bidang Pembukuan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	795 - Bidang Perbendaharaan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	796 - Bidang Pembinaan/Kebendaharaan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	797 - Bidang Pendapatan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
	799 - Bidang Perbendaharaan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
<b>IX. KEPEGAWAIAN</b>						
1	<b>1810</b>	<b>PENGADAAN</b>				
		Lamaran	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Testing				
		- Screening				
		- Panggilan				
2	<b>2820</b>	<b>MUTASI</b>				
		- Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
		- Kenaikan Gaji Berkala				
		- Kenaikan Pangkat / Pengangkatan				
		- Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan				
		- Dataseking dan Penempatan Kembali				
		- Penunjukkan Tugas Belajar				
		- Wajib Militer				

PARA-DEKENS  
KABAG  
KASUBB-G  
STAF



NO (1)	KLASIFI KASI (2)	JENIS ARSIP (3)	KLASIFIKASI KEAMANAN (4)	HAK AKSES (5)	DASAR PERTIMBANGAN (6)	UNIT PENGOLAH (7)
		- Mutasi dengan instansi lain				
3	830	<b>Kedudukan</b> - Perhitungan Masa Kerja - Penyesuaian Pangkat / Gaji - Penghargaan Ijazah / Penyesuaian - Jenjang Pangkat / Eselonering	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/Unit Kerja	Bidang Teknis
4	840	<b>KESEJAHTERAAN PEGAWAI</b> - Tunjangan - Dana - Perawatan Kesehatan - Koperasi / Distribusi - Perumahan / Tanah - Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
5	850	<b>CUTI</b> - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Hamil - Cuti Naik Haji/ Umroh - Cuti Di Luar Tanggungan Negara - Cuti Alasan Lain / Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
6	860	<b>PENILAIAN</b> - Penghargaan - Hukuman - Kondite, DP3, Disiplin Pegawai - Ujian Dmas - Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri - Rehabilitasi / Pengaktifan Kembali	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
7	870	<b>TATA USAHA KEPEGAWAIAN</b> - Formasi - Bezetting / Daftar Urut Kepangkatan - Registrasi - Daftar Riwayat Pekerjaan - Kewenangan Mutasi Pegawai - Penggajian - Sumpah / Janji - Korps Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
8	880	<b>PEMBERHENTIAN PEGAWAI</b> - Permintaan Sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

PARAF KEMES  
KABAG  
KASUBBAGI  
STAF



NO	KLASIFIKASI KASIP	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Dengan Hak Pensiun				
		- Karena Meninggal				
		- Alasan Lain				
		- Uang Pesangon				
		- Uang Tunjangan				
		- Untuk Sementara Waktu				
		- Tidak Dengan Format				
9	890	<b>PENDIDIKAN PEGAWAI</b>	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		- Perencanaan				
		- Pendidikan Egular / Kader				
		- Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler				
		- Pendidikan Luar Negeri				
		- Metode				
		- Tenaga Pengajar / Widyaiswara / Narasumber				
		- Administrasi Pendidikan				
		- Fasilitas Belajar				
		- Sarana				
<b>X. KEUANGAN</b>						
900	KEUANGAN					
1	901	Nota Keuangan				
		- Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Hibah				
		- Bantuan Sosial				
	905	Dana Alokasi Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Berkas pengajuan				
		- Penggunaan DAU				
		- Laporan				
	906	Dana Alokasi Khusus	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Berkas pengajuan				
		- Penggunaan DAK				
		- Laporan				
		- Dana bagi hasil				
2	910	<b>ANGGARAN</b>				
	911	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda APBD				
	912	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan				
		- Penggunaan				
	913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang

PARAF KOPI  
 KABAG  
 KASUBAG  
 STAF



NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD				
914		Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Daftar Usulan Kegiatan (DUK)				
		- Pengusulan Pra RKA				
		- Pengusulan RKA				
		- Pembahasan				
915		Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Daftar Usulan Proyek (DUP)				
		- Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)				
916		Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Pengusulan realisasi APBD				
917		Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
918		Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
3	920	<b>OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)</b>				
	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	922	SLAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
4	930	<b>Verifikasi</b>				
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Keg., Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	933	Penerimaan (Daftar P6, P7)/Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	934	SPJ Rutin/SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	935	SPJ Pembangunan/SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
5	940	<b>PEMBUKUAN</b>				
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Neraca				
		- Catatan anggaran laporan keuangan				
6	950	<b>PERBENDAHARAAN</b>				
	951	Tuntutan Ganti Rugi ( ICW Pasal 74)/ Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Aset Daerah				
		- Aset Bergerak				
		- Aset tidak bergerak				




PARAF KOREK  
KABAG  
KASUBBAG  
STAF




NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HIK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Aset tidak berwujud				
954		Pengangkatan/Penggantian/PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
955		Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
956		Surat Tagihan Putang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
957		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
7	960	<b>PEMBINAAN KEBENDAHARAAN</b>				
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	963	Laporan Keuangan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
		- Laporan keuangan bulanan				
		- Laporan keuangan tahunan				
8	970	<b>PENDAPATAN</b>				
		- Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	972	Subsidi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	973	Pajak, Ipeka, IHH, IHPH, PBB	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	974	Retribusi	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	975	Bea	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	976	Cukai	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	977	Pungutan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Provinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
9	980	<b>SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				
10	990	<b>BENDAHARAWAN</b>				
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Sekretariat, Bidang

BUPATI REJANG-LEBONG,

  
H. AHMAD HAJAZI

PARAF KOORDINAS:	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBKAB	
Ditoms	
PEMBAKARS	

TCL:  
KABAG. ADM. HUKUM,  
  
N A S K A H  
PROBUK HUKUM INI  
TELAH DITELITI /  
DIKORREKSI OLEH  
BAG. ADM. HUKUM  
KABUPATEN REJANGLEBONG  
T.P. 1975 1023 2000 12 1 000